

EVALUASI PROGRAM PENGADAAN TRUK SAMPAH DI DESA PAKATTO BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA

Irmadana Muttahhara^{1*}, Fatmawati², Nasrul Haq³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the evaluation of the Garbage Truck Procurement Program in Pakatto Bontomarannu Village, Gowa Regency. The type of research used qualitative as an attempt to describe in general with the existing facts. There were 9 informants. The data collection techniques were interview, direct observation and documentation. The results showed that the effectiveness of the procurement of garbage trucks in Pakatto village was considered more effective for villagers considering the habit of residents/communities being more likely to throw their garbage around the river. The efficiency of this garbage truck procurement was considered very good, based on the community's regular monthly fee of Rp. 20,000. This routine fee was allocated for the operational costs of the garbage collectors for the BumDes cash inflow. The adequacy of the procurement of this garbage truck was considered sufficient in transporting the waste of residents who had paid their dues. The responsiveness of the community was different, there were people who responded quite well and there were also people who responded with uninterested. The accuracy of the garbage truck procurement program was considered inappropriate, considering the highland areas that could not be reached by garbage trucks and the principle of benefit was no longer appropriate for its function.

Keywords: *evaluation, truck procurement program*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Program Pengadaan Truk Sampah di Desa Pakatto Bontomarannu Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan yaitu kualitatif sebagai upaya untuk menggambarkan secara umum dengan fakta yang ada. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi/pengamatan langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengadaan truk sampah di Desa Pakatto dinilai lebih efektif bagi warga desa mengingat kebiasaan warga/masyarakat lebih cenderung membuag sampahnya di sekitar sungai. Efisiensi pengadaan truk sampah ini dinilai sangat baik, didasarkan pada iuran rutin bulanan masyarakat sebesar Rp. 20.000, dari biaya rutin ini diperuntukkan untuk biaya operasional petugas pengangkut sampah untuk kas masuk BumDes. Kecukupan dalam pengadaan truk sampah ini dinilai sudah cukup dalam mengangkut sampah warga yang telah membayar iuran. Responsivitas masyarakat yang berbeda-beda, ada masyarakat yang merespon cukup baik dan juga ada masyarakat yang merespon dengan sikap yang biasa saja. Ketepatan program pengadaan truk sampah dinilai kurang tepat, melihat kawasan daataran tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh truk sampah serta azas manfaat yang sudah tidak sesuai lagi fungsinya.

Kata kunci: evaluasi, program pengadaan truk

* irmadana@gmail.com

PENDAHULUAN

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Keberadaannya tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik karena pengelolaan sampah yang tidak saniter dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan gangguan pada kesehatan manusia. Salah satu dampak negatif pada lingkungan disebabkan oleh berbagai bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkandung di dalam sampah. Sampah masih menjadi masalah di Indonesia karena pelayanan yang dilakukan saat ini masih relatif terbatas (Hasbullah, 2017).

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah.

Pelaksanaan pengadaan transportasi atau truk sampah di Kabupaten Gowa menjadi salah-satu program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Oleh karena itu, melalui program ini tentu harus dimanfaatkan dalam meminimalkan penumpukan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah harus semakin diperhatikan karena

berhubungan dengan efisiensi biaya. Dengan optimasi subsistem ini diharapkan pengangkutan sampah menjadi mudah, cepat, serta biaya relatif murah karena anggaran yang digunakan untuk pembelian truk sampah sebanyak 121 unit tersebut menggunakan ADD. Oleh sebab itu, penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi langsung agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang.

Dari gambaran permasalahan ini, sangat penting untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang evaluasi kebijakan terkhusus tentang program pengadaan truk sampah untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan sehingga dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dalam proses berjalannya program tersebut dan apakah kebijakan tersebut dapat memberi dampak yang baik bagi masyarakat. Atas dasar inilah, penulis memilih judul yaitu evaluasi Program Pengadaan Truk Sampah di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Menurut David Easton menyatakan bahwa “*Public policy is the authoritative allocation values for the whole society*” (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat) (Anggara, 2014).

Lebih lanjut, menurut Bullock et al. dalam buku kebijakan publik yang ditulis oleh Sahya Anggara (2014). Untuk bisa disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu diikuti langkah tindakan pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan.

Menurut Dunn (2016:608) evaluasi kebijakan merupakan sebuah gambaran bahwa dari pelaksanaan dinilai berdasarkan informasi yang diterima dan diperoleh langsung di lapangan. Namun sebenarnya evaluasi memiliki fungsi bukan hanya dalam bentuk penilaian terhadap kebijakan melainkan melihat tingkat kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran, mengetahui pemanfaat dan dana yang digunakan oleh suatu kebijakan serta mengukur dampak suatu kebijakan (Yulida, 2019).

Evaluasi merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang seberapa jauh suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan mencapai tujuannya.

Menurut Dunn, (2003) evaluasi terdapat banyak fungsi utama dalam analisis kebijakan sebagai berikut: 1) Evaluasi tersebut akan memberikan informasi yang efektif dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, yaitu seberapa besar permintaan nilai dan peluang yang telah dicapai melalui

tindakan publik, 2) Evaluasi akan membantu memperjelas dan mengkritik nilai berdasarkan pilihan tujuan dan indikator, 3) Evaluasi membantu menerapkan metode analisis kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Selain itu, evaluasi juga tentu memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, dapat dirincikan sebagai berikut: 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan, 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan, 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif, 4) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik lagi (Subarsono, 2005).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan berikut indikator dari efektivitas yaitu dapat dilihat dari tujuan dari sebuah kebijakan dan sasaran dari sebuah kebijakan.

Lebih lanjut, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan perlu untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan maka dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn, (2003) mencakup enam indikator sebagai berikut: 1) Efektivitas (*Effectiveness*) efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan hasil yang diinginkan telah tercapai. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik dan masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan berikut indikator dari efektivitas yaitu dapat dilihat dari tujuan dari sebuah kebijakan dan Sasaran dari sebuah kebijakan, 2) Efisiensi (*Effeciency*) efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator efisiensi yaitu dari segi biaya, dari segi waktu dan dari segi tenaga, 3) kecukupan (*Eduquacy*) kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Dapat dilihat setelah pelaksana kebijakan dan pengawasan yang dilakukan, 4) responsivitas (*responsiveness*) responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan, dan 5) ketepatan (*Appropriateness*) ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat dan hasil yang dicapai bermanfaat (Irawan, 2017).

Pengadaan ialah kegiatan menyediakan fasilitas baru yang dilaksanakan di sebuah instansi

pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa tentunya mempunyai tujuan-tujuan dan sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

METODE

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Pakatto, Jl. Poros Malino, Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai salah satu unsur pendukung dalam berjalannya program pengadaan truk sampah di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif dimana penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi (Sugiyono, 2016).

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk menggambarkan secara umum dengan fakta yang ada untuk menjawab semua permasalahan yang akan diangkat atau diteliti.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini maka beberapa teknik yang digunakan yaitu observasi, teknik observasi peneliti secara langsung mendatangi lokasi serta mengamati langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat sebagai laporan hasil pencapaian dari suatu kebijakan. wawancara, dimana peneliti memilih informan yang bersangkutan atau yang terlibat dalam program pengadaan truk sampah untuk dilakukan wawancara sebagai tambahan informasi dengan melakukan tanya jawab mengenai sejauh mana program tersebut berjalan. Dokumentasi, proses dokumentasi menjadi salah-satu hal penting sebagai teknik untuk memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pakatto adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bontomarannu yang terletak dibagian selatan kabupaten Gowa dengan jarak \pm 11 km dari Ibu Kota Kabupaten Gowa, 23 km dari Ibu Kota Provinsi dan 2 km

dari Ibu Kota Kecamatan dengan luas wilayah ± 1.134 ha.

Struktur organisasi pemerintahan Desa Pakatto merupakan susunan perangkat kerja yang ada di Desa Pakatto itu sendiri, dimana susunan struktur tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra, Kaur Administrasi, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Staf, dan 4 kepala Dusun yaitu Kepala Dusun Pakatto Caddi, Kepala Dusun Pakatto Lompo, Kepala Dusun Pakatto Carammeng, Kepala Dusun Lantebung.

Pada penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana pembuat kebijakan mengimplementasikan suatu program dengan melihat kriteria atau indikator evaluasi kebijakan untuk melihat tingkat keberhasilan setelah program tersebut berjalan cukup lama. Oleh karena itu, fokus penelitian ini yaitu mengenai evaluasi program pengadaan truk sampah di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Dalam mengevaluasi program pengadaan truk ini perlu adanya hasil penelitian yang lebih efektif dan jelas, sehingga dalam hal ini masyarakat juga tau bahwa program truk sampah ini tidak sekedar menjadi program semata saja, karena awalnya banyak warga

yang tidak paham dengan adanya pengadaan truk sampah ini mengingat wilayah yang ada di kabupaten Gowa memiliki wilayah dataran tinggi, dan dengan mengangkat sampel di desa Pakatto sebagai lokasi penelitian.

Efektivitas

Adapun yang dimaksud efektivitas dalam Pengadaan truk sampah sebagai program yang terpilih untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Gowa yang sudah terlaksana cukup lama dan dapat dinilai keefektivannya dengan melihat indikator dari efektivitas yaitu tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran truk sampah yaitu apakah kelompok masyarakat sudah memperoleh manfaat dan mengurangi dampak program pada kualitas kehidupan masyarakat.

Dampak dari adanya truk sampah ini sangat membantu warga dalam menjaga sampahnya, terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman desa serta masyarakat yang tinggal di lorong-lorong itu sangat membantu, dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai atau membuang sampah dipinggir jalan raya serta banyak juga masyarakat yang membuang sampahnya hanya dibelakang rumahnya dengan cara menimbun sampah sendiri, hal ini

menurut informan sangat terbantu sebagai aparat pemerintah desa dengan adanya truk sampah tersebut.

Dampak dari pengadaan truk sampah ini hanya sebagian masyarakat yang menikmatinya itupun hanya masyarakat yang melakukan pembayaran atau iuran tiap bulannya, dan sampah yang diangkut hanya pemukiman warga yang mudah dijangkau oleh truk tersebut tidak dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di lorong-lorong kecil ataupun masyarakat yang tinggal dipedalaman sehingga kurang efektif dalam melakukan tugasnya mengumpulkan sampah masyarakat.

Dampak dari pengadaan truk sampah ini dinilai sangat memiliki dampak yang baik karena sampah yang biasa menumpuk di pinggir jalan itu sudah teratasi tempat sampah didepan rumah masyarakat sudah teratur sehingga ketika petugas sampah datang sampah langsung diangkut sehingga lebih efektif.

Dampak dengan adanya truk sampah ini sangat berdampak bagi masyarakat yang telah mendapatkan layanan angkutans sampah dengan membayar iuran tiap bulannya, dampak ini sangat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya terlebih lagi masyarakat yang sering membuang sampah di

sungai karena jarak yang terlalu jauh dari bak sampah yang dulu disiapkan oleh pemerintah desa Pakatto.

Pengadaan truk sampah di Desa Pakatto dinilai lebih efektif bagi warga desa mengingat kebiasaan warga/masyarakat lebih cenderung membuag sampahnya di sekitar sungai ataupun membuangnya di belakang rumah masing-masing, dengan adanya truk sampah ini masyarakat tidak perlu lagi ke sungai untuk membuang sampah ke sungai dan lebih menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan dengan adanya truk sampah ini lebih menyadarkan lagi sebagian warga untuk membuang sampah pada tempatnya.

Efisiensi

Tingkat efisiensi dari program pengadaan truk sampah dilihat dari indikator efisien itu sendiri yakni dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Dari segi biaya yaitu seberapa banyak biaya yang perlu di siapkan selama pengoperasian truk sampah dalam persiapan bahan bakar minyak (BBM). Selanjutnya, dari segi waktu yang menjadi jadwal pengoperasian truk untuk menjangkau rute pengambilan di tempat pembuangan sampah. Terakhir ialah dari segi tenaga, yang dimaksud dari tenaga tersebut ialah sumber daya manusia itu sendiri sebagai tolak ukur

keberhasilan dari pelaksanaan program truk sampah di Kabupaten Gowa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Biaya operasional didapatkan dari iuran warga yang telah membayar tiap bulannya sebesar Rp. 20.000, dari iuran tersebut digunakan untuk biaya gaji supir dan petugas pengangkut serta untuk pembelian bahan bakar solar, adapun warga yang tidak membayar iuran ialah warga yang tidak ingin sampahnya diangkut dikarenakan para warga beralasan telah memiliki lahan sendiri untuk dijadikan tempat pembuangan sampah pribadi.

Biaya operasional dari dari program truk sampah ini dengan membebaskan masyarakat yang sepakat membayar iuran angkutan sampah sebesar Rp. 20.000 tiap bulannya, adapun warga yang tidak membayar iuran karena menganggap bahwa sampah rumah yang dihasilkan tidak terlalu banyak sehingga lebih memilih membuang sampahnya dibelakang rumah masing-masing dan juga kebanyakan warga telah memiliki lahan untuk dijadikan pembuangan sampah pribadi.

Bahwa tahap dalam pengoperasian truk sampah di Desa Pakatto telah melalui hasil musyawarah desa yang dihadiri oleh pihak

pemerintahan Desa, BPD, BumDes dan Masyarakat sehingga telah disepakati bahwa iuran masyarakat dibebankan sebesar Rp. 20.000, informan juga menambahkan bahwa dari jumlah penduduk 1.707 KK hanya 806 KK yang sepakat membayar iuran sampah, jadi masyarakat yang tidak membayar iuran tidak akan terangkut sampahnya.

Bahwa tingkat Efisiensi pengadaan truk sampah ini dinilai sangat baik, didasarkan pada iuran rutin bulanan masyarakat sebesar Rp. 20.000, dari biaya rutin ini diperuntukkan untuk biaya operasional petugas pengangkut sampah untuk kas masuk BumDes, efisiensi biaya ini telah disepakati dari hasil musyawarah pemerintah desa dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan yang tidak diinginkan yang mengakibatkan rusak tatanan bermasyarakat khususnya di Desa Pakatto.

Kecukupan

Pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dilakukan maka dapat dilihat kebutuhan atau jumlah kecukupan truk sampah yang harus disediakan pada setiap desa. Selain itu, nilai atau seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah yaitu permasalahan sampah setelah pengadaan truk sampah terlaksana serta

setelah program tersebut diimplementasikan.

Dapat diketahui bahwa pengadaan truk sampah ini telah dicukupkan oleh Pemerintah Kabupaten setiap desa hanya 1 truk, hal ini dianggap sudah mumpuni dalam melaksanakan tugasnya dalam mengangkut sampah di rumah-rumah warga, hal ini juga disampaikan oleh informan bahwa pengelolaan operasional truk sampah ini telah diserahkan langsung oleh BumDes, sehingga segala biaya operasional ini diatur sedemikian rupa dan lebih terbuka dan juga keuntungan yang ada masuk di kas BumDes, pemetaan lokasi pengangkutan sampah juga didasarkan atas warga yang telah membayar di tiap dusun, terlebih lagi pengawasan dan pertanggungjawabannya dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan hasil yang telah dicapai seperti apa.

Dapat diketahui bahwa pengadaan truk sampah sudah menjadi kecukupan bagi di tiap desa khususnya di Desa Pakatto, dengan adanya truk sampah ini menjadi solusi selama ini mengenai persoalan sampah, karena truk sampah ini keliling desa untuk mengangkut sampah yang ada didepan rumah warga yang sebelumnya warga masyarakat selama ini kurang peka untuk menjaga

kebersihan seperti dengan buang sampah dipinggir jalan atau buang sampah di sungai-sungai sebagian juga warga menimbun sampahnya dibelakang rumahnya.

Bahwa kecukupan dalam pengadaan truk sampah ini dinilai sudah cukup dalam mengangkut sampah warga yang telah membayar iuran, terlebih lagi semua biaya operasional dan sistem pengoperasian truk sampah ini diolah langsung oleh BumDes sehingga lebih jelas pelaksanaannya serta pemerintah Desa sebagai pengawas dalam pelaksanaan truk sampah ini, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan truk sampah ini juga dilakukan setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk evaluasi perkembangan dan hasil pengelolaannya.

Responsivitas

Responsivitas, seberapa jauh kebijakan pengadaan truk sampah sebagai program penanganan permasalahan sampah disuatu daerah yang menjadi target dapat memberi kepuasan warga negara. Pengadaan truk sampah yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten telah berjalan secara menyeluruh diseluruh desa yang sangat diharapkan masyarakat pedesaan dapat merespon baik dengan adanya

truk sampah bagi seluruh desa dalam menangani persoalan-persoalan sampah yang ada di desa-desa, truk sampah ini menjadi akses utama dalam mengangkut sampah di pelosok desa yang sulit dijangkau.

Dapat diketahui bahwa dengan adanya truk sampah ini dan dengan berjalannya truk pengangkut sampah ini sangat direspon baik oleh masyarakat walaupun hanya sebagian masyarakat yang merespon baik, mengingat dulunya banyak sampah yang dibuang di sungai dan sampah juga sebagian di buang dipinggir jalan saat ini semua persoalan itu dapat teratasi dengan baik.

Bahwa keberadaan truk pengangkut sampah ini telah mendapat respon yang cukup baik oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Pakatto, dengan adanya truk sampah ini sangat memberikan manfaat yang signifikan karena persoalan sampah khususnya di Desa Pakatto dapat teratasi.

Dapat kita ketahui bahwa keberadaan pengadaan truk sampah ini mendapat respon yang cukup baik oleh sebagian masyarakat sebagian lagi masyarakat yang merespon biasa-biasa saja, informan juga menambahkan bahwa pengadaan truk sampah ini dinilai membuang anggaran karena masih banyak hal yang lebih penting untuk diselesaikan seperti, masalah

jalan tani, akses jalan warga dan juga masalah-masalah sosial lainnya.

Bahwa responsivitas masyarakat yang berbeda-beda, ada masyarakat yang merespon cukup baik dan juga ada masyarakat yang merespon dengan sikap yang biasa saja dalam artian tidak peduli namun ada juga warga yang menganggap bahwa program pengadaan truk sampah ini bukanlah prioritas utama untuk masyarakat, banyak hal yang menjadi prioritas utama masyarakat dibandingkan dengan pengadaan truk pengangkut sampah tersebut.

Pengadaan truk sampah mungkin sangat dibutuhkan oleh sebagian wilayah, namun harus sesuai keadaan wilayah itu sendiri. Tetapi, beberapa daerah tidak tepat dengan program pengadaan truk sampah karena berada di daerah pegunungan yang tidak dapat dijangkau dengan truk sehingga masyarakat yang berada di daerah pegunungan tidak menerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Ketepatan

Dapat diketahui bahwa pengadaan truk sampah yang dilakukan oleh Kepala Desa Pakatto itu sudah sesuai prosedur yang ada, ditambahkan juga bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Bupati Gowa pada tahun 2019 menjadi

landasan para Kepala Desa untuk membeli truk sampah sehingga dinilai tepat sasaran dan juga dapat menjalankan program Bupati Gowa untuk dapat mengangkut sampah-sampah hingga ke desa-desa, pengadaan truk sampah ini menjadi alat dalam mengangkut sampah-sampah yang ada di tiap desa sehingga mendorong pemerintah desa untuk konsisten menggunakan truk sampah dalam mengangkut sampah-sampah masyarakat.

Bahwa pengadaan truk sampah ini termasuk program kebersihan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten sejak tahun 2019, sehingga seluruh kepala Desa yang ada di kabupaten Gowa diwajibkan untuk membeli truk sampah dengan menggunakan anggaran dana desa masing-masing, pengadaan truk sampah ini diperuntukkan untuk menangkut sampah-sampah masyarakat hingga masuk ke pelosok desa, dengan demikian tidak ada lagi penumpukan sampah disekitar rumah warga akan tetapi pengadaan truk sampah ini dinilai hanya untuk daerah tertentu seperti daerah kawasan dataran rendah, untuk kawasan dataran tinggi/pegunungan itu tidak tepat sasaran dikarenakan wilayah yang sangat jauh dan juga kondisi alam yang berbeda dikawasan perkotaan atau dataran rendah.

Dapat diketahui bahwa pengadaan truk sampah ini dinilai sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan dengan Intruksi Bupati Gowa pada tahun 2019 sebagai bagian dalam program kebersihan yang ada di Kabupaten Gowa ini, ditambahkan juga oleh informan bahwa pengadaan truk sampah ini dinilai kurang tepat bagi kawasan dataran tinggi pegunungan, truk sampah tidak akan mampu menjangkau kawasan pedalaman yang ada di kawasan pegunungan, serta ketepatan truk sampah ini sudah diluar fungsinya seperti sudah digunakan untuk mengangkut batu, tanah dan pasir dari tambang masyarakat.

Bahwa sejauh ini dalam pengadaan truk sampah dinilai kurang tepat, melihat kawasan dataran tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh truk-truk sampah serta ketepatan dari azas manfaatnya yang sudah tidak berdasarkan lagi fungsinya yang semula diperuntukkan untuk mengangkut sampah dan kini digunakan untuk mengangkut material-material lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Program Pengadaan Truk Sampah di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten

Gowa, maka dari itu penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Efektivitas pengadaan truk sampah di Desa Pakatto dinilai lebih efektif bagi warga desa mengingat kebiasaan warga/masyarakat lebih cenderung membuag sampahnya di sekitar sungai ataupun membuangnya di belakang rumah masing-masing, 2. Efisiensi pengadaan truk sampah ini dinilai sangat baik, didasarkan pada iuran rutin bulanan masyarakat sebesar Rp. 20.000, dari biaya rutin ini diperuntukkan untuk biaya operasional petugas pengangkut sampah untuk kas masuk BumDes Desa Pakatto, 3. Kecukupan dalam pengadaan truk sampah ini dinilai sudah cukup dalam mengangkut sampah warga yang telah membayar iuran, pemerintah Desa sebagai pengawas dalam pelaksanaan truk sampah ini, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan truk sampah ini juga dilakukan setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk evaluasi perkembangan dan hasil pengelolaannya, 4. Responsivitas masyarakat yang berbeda-beda, ada masyarakat yang merespon cukup baik dan juga ada masyarakat yang merespon dengan sikap yang biasa saja, 5. Ketepatan sejauh ini dalam pengadaan truk sampah dinilai kurang tepat, melihat kawasan dataran tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh truk-truk

sampah serta ketepatan dari azas manfaatnya yang sudah tidak berdasarkan lagi fungsinya yang semula.

REFERENSI

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasi Sekolah. *Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1).
- Alfath, M. (2018). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pengelolaan Persampahan di Kota Palangka Raya. *Borneo Administrator*, 14(1).
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasbullah. (2017). Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Subulussalam. *Jumantik*, 4(2).
- Hassri, B. I. (2020). Perancangan Troli Pengangkut Sampah Pada Pasar Modern Batununggal Indah. *eProceedings of Art & Design*, 7(2).
- Irawan, R. (2017). Evaluasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasati) di Kabupaten Kampar. *Jom FISIP*, 4(2), pp. 5–6.
- Khatimah, H. (2018). *Evaluasi Program Pengelolaan Bank Sampah Unit Mawar Merah di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar) Diperoleh dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OGY5YTUXN2FkZjFiNTIjMWF

- hMTIwMDUzZGFmN2Q2NjViN
TI2NTQ5Ng==.pdf
- Lucky, D. (2019). *Evaluasi Sistem Pengangkutan Sampah di Kabupaten Bondowoso* (Skripsi, Universitas Jember, Sumpersari). Diperoleh dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/96161>
- Maya D. D. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Governansi*, 4(1).
- Mayangkara, A. P. (2016). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di TPA Gunung Pangung Kabupaten Tuban (Kualitatif)*. JPAP: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(02).
- Ramdhani, A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Publik*, 11(1).
- Ribawayasa, M. (2018). *Tinjauan Pengelolaan Sampah di desa Ringdikit Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng* (Diploma Thesis, Poltekkes Denpasar, Denpasar). Diperoleh dari <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/433/>
- Rusmini. (2007). Aplikasi Dan Evaluasi Kebijakan (Analisis Kebijakan Walikota Jambi Tentang Penghapusan Pungutan Sekolah Dari Masyarakat). *Annual Conference on Islam Education Management (ACIEM)*, 853–865.
- Sahil, J. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *BIOeduKASI*, 4(2).
- Saputri, M. M. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah. (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri). *JIA FIA UB*, 3(11).
- Sobirin, U. B. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tato, S. (2015). Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu. *Jurnal Plano Madani*, 4(2), pp. 65–79.
- Yulida, E. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara* (Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak). Diperoleh dari <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/2521>